

**PEKERJAAN STAF ADMINISTRASI
KESEKRETARIATAN KEPEGAWAIAN DI DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT**



LAPORAN PRAKTIK KERJA

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh predikat Ahli Madya

Oleh:

Nama : Verdy Verdiansah

NPM : 2013910017

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN
PERUSAHAAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT
No : 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015
BANDUNG
2017**

**THE DUTIES OF ADMINISTRATIVE SECRETARY
STAFF AT DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA
BARAT**



ON THE JOB TRAINING REPORT

This report is made to fulfill the requirement of the Diploma III
Business Management Program

By :
Name : Verdy Verdiansah
NPM : 2013910017

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMIC
DIPLOMA III OF BUSINESS MANAGEMENT PROGRAM
Accredited based on the decree of BAN-PT
No : 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015
BANDUNG
2017**



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
DIPLOMA III
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERUSAHAAN**



**PEKERJAAN STAF ADMINISTRASI
KESEKRETARIATAN KEPEGAWAIAN DI DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:
Nama : Verdy Verdiansah
NPM : 2013910017

PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA

Bandung, Januari 2017
Ketua Program Studi DIII Manajemen Perusahaan,

(Elvy Maria Manurung, S.E, Ak., M.T.)

Pembimbing,

Penguji Ahli,

(Dr. F.X. Supriyono, Drs., M.M.)

(Nina Septina, S.P., M.M.)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Verdy Verdiansah
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 01 Desember 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013910017
Program Studi : DIII Manajemen Perusahaan
Jenis Naskah*) : ~~Skripsi / Makalah / Artikel~~ / Laporan Praktik Kerja

JUDUL

PEKERJAAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KEPEGAWAIAN DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Dengan,
Pembimbing : Dr. F.X. Supriyono, Drs., M.M.
Ko. Pembimbing :-

SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis sendiri;

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut diatas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya unguap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademi, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 : Lulusan perguruan tinggi yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200 Juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal: 10 Januari 2017
Pembuat pernyataan: Verdy Verdiansah



*) *coret yang tidak perlu*

ABSTRAK

Dalam penyusunan laporan praktik kerja ini, penulis melakukan praktik kerja di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Surapati No. 67 Bandung, Jawa Barat. Waktu kegiatan praktik kerja dilaksanakan pada tanggal 8 September 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016 atau yang setara dengan 221 jam kerja. Praktik kerja dilaksanakan selama 4 hari dalam seminggu, dengan jadwal kerja 8,5 jam untuk hari Senin – Jum'at.

Pada pelaksanaan praktik kerja, penulis diberikan beberapa tugas yang diantaranya adalah: (i) membuat daftar absensi pegawai yang melaksanakan piket, (ii) melakukan rekapitulasi absensi harian, (iii) melakukan rekapitulasi absensi bulanan, (iv) melakukan *input* data absensi pegawai yang melakukan piket. Masalah yang penulis alami adalah perangkat komputer yang digunakan penulis selama pelaksanaan praktik kerja memiliki koneksi internet yang lambat dan terkadang tidak bisa menggunakan jaringan internet. Masalah selanjutnya yang dihadapi penulis adalah seringkali website absensi online kurang update mengenai data kehadiran harian pegawai. Hal ini membuat pekerjaan penulis menjadi sedikit terhambat.

Setelah melaksanakan praktik kerja, penulis telah mempelajari bagaimana tata cara membuat daftar absensi pegawai yang baik dan benar. Selain itu penulis juga telah mempelajari bagaimana tata cara rekapitulasi absensi secara harian dan bulanan. Ketelitian dalam input absensi harian mempengaruhi dalam rekapitulasi absensi bulanan. Dengan melakukan input absensi dan rekapitulasi absensi menggunakan aplikasi komputer, penulis menjadi lebih memahami fungsi dan manfaat sistem aplikasi komputer. Penerapan sistem berbasis komputer membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis terhadap proses pekerjaan staf kepegawaian secara keseluruhan sudah baik, namun masih ada sedikit kekurangan di bagian pekerjaan tertentu. Untuk menanggapi kekurangan tersebut, penulis mengajukan saran yaitu, perusahaan dapat membenahi sistem website absensi online agar absensi harian yang menggunakan fingerprint dapat diakses sudah dengan data yang lengkap. Hal ini akan memudahkan penulis dalam melakukan pekerjaannya dan tidak mengecek ulang data absensi yang memakan waktu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja ini yang berjudul “**Pekerjaan Staf Administrasi Kesekretariatan Kepegawaian Di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**”.

Selama proses penulisan laporan ini penulis mendapat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga laporan praktik kerja ini dapat diselesaikan. Sebagai wujud rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bimbingannya kepada:

1. Orangtua penulis Bapak Dedi Rusmana dan Ibu Shenny Shintia Dewi serta adik penulis Aldy Septiansahyang telah memberi dukungan, semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan laporan praktik kerja ini
2. Ibu Elvy Maria Manurung S.E., Ak., M.T. selaku Kepala Program Studi DIII Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan dan juga selaku dosen wali penulis.
3. Bapak Dr. F.X. Supriyono, Drs., M.M. selaku Pembimbing penulis yang membantu, membimbing dan mengoreksi dalam tugas akhir ini
4. Bapak Asep dan Ibu Leoni beserta segenap petugas tata usaha Progam Studi Diploma III Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
5. Bapak dan Ibu dosen Diploma III Manajemen Perusahaan yang telah membimbing, serta memberikan ilmu pada saat masa perkulihaan di Diploma III Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyanagan
6. Bapak Iwan Setiawan selaku Pengelola Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan praktik kerja

7. Bapak Cepi Supriatna, S.AP selaku pembimbing penulis selama melaksanakan praktik kerja di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat bidang kesekretariat kepegawaian
8. Sahabat penulis Fikri, Ryan, Dedol, RC, Alvin, Peni, Deby, Dewi, Alex, Kajay, Rery, Ami, Bang Rendy, Kagung, Kofer, Achmad, Iga, Ghifari, Ipang, Billy, Oche, dan seluruh teman-teman komunitas Mang Iday
9. Sahabat SMA penulis Aldy Memet, Said, Irvan, Bapau, Jepi, Aming dan seluruh teman-teman komunitas Pemuda Hijrah
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Terima kasih.

Bandung, Januari 2017

Penulis,
Verdy Verdiansah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Tempat Dan Waktu Praktik Kerja	1
1.2. Bidang Dan Pekerjaan Praktik Kerja.....	1
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Praktik Kerja.....	1
1.4. Profil Tempat Praktik Kerja.....	2
1.4.1. Sejarah Perusahaan.....	2
1.4.2. Struktur Organisasi Perusahaan Dan Uraian Pekerjaan	10
1.4.3. Kondisi Permodalan Dan Keuangan	13
1.4.4. Kegiatan Usaha.....	14
1.4.5. Gambaran Umum Ketenagkerjaan	14
BAB 2 KEGIATAN PRAKTIK KERJA	17
2.1. Uraian Pekerjaan.....	17
2.2. Proses dan Prosedur Pelaksanaan Praktik Kerja.....	20
2.3. Masalah Dalam Praktik Kerja.....	25
2.4. Manajemen Sumberdaya Manusia dan Masalah Absensi	26
2.4.1. Pengertian Manajemen Sumberdaya Manusia	26
2.4.2. Fungsi Manajemen Sumberdaya Manusia	27
2.4.3. Perencanaan Sumberdaya Manusia	31
2.4.4. Penyebab Absensi.....	37
BAB 3 PENUTUP	48
3.1. Kesimpulan	48
3.2. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1. JUMLAH PEGAWAI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT BAGIAN KEPEGAWAIAN	14
TABEL 1.2. GAJI AWAL KERJADINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	15
TABEL 2.1. JAM KERJA PENULIS DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	17
TABEL 2.2. JADWAL KEGIATAN PRAKTIK KERJA	18

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1. STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT.....	10
GAMBAR 2.1. <i>FLOWCHART</i> PEMBUATAN DAFTAR ABSENSI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PIKET.....	20
GAMBAR 2.2. CONTOH TABEL ABSENSI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PIKET	21
GAMBAR 2.3. <i>FLOWCHART</i> REKAPITULASI ABSENSI HARIAN.....	22
GAMBAR 2.4. CONTOH REKAPITULASI ABSENSI HARIAN.....	22
GAMBAR 2.5. <i>FLOWCHART</i> REKAPITULASI ABSENSI BULANAN.....	23
GAMBAR 2.6. CONTOH REKAPITULASI ABSENSI BULANAN.....	24
GAMBAR 2.7. <i>FLOWCHART INPUT</i> DATA ABSENSI PIKET	24
GAMBAR 2.8. CONTOH <i>INPUT</i> DATA ABSENSI PIKET.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 FORMULIR PERMOHONAN MELAKUKAN PRAKTIK KERJA.....	51
LAMPIRAN 2 SURAT PENGANTAR KE PERUSAHAAN	52
LAMPIRAN 3 FORMULIR BALASAN DARI PIHAK PERUSAHAAN.....	53
LAMPIRAN 4 FORMULIR PENILAIAN DARI PERUSAHAAN	54
LAMPIRAN 5 FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA.....	55
LAMPIRAN 6 KARTU BIMBINGAN	57
LAMPIRAN 7 FORMULIR PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Tempat Dan Waktu Praktik Kerja

Penulis melakukan praktik kerja sebagai staff kepegawaian di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Surapati No. 67 Bandung. Praktik kerja yang penulis lakukandmulai tanggal 8 September 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016. Praktik kerja ini dilakukan setiap Selasa – Jum’at pukul 07.30 - 16.00 WIB atau setara 221 jam.

1.2. Bidang Dan Pekerjaan Praktik Kerja

Bidang praktik kerja yang dilaksanakan oleh penulis adalah Bidang Sekretariat Kepegawaian pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Pekerjaan yang diberikan perusahaan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan praktik kerja di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat diantaranya, yaitu membuat daftar absensi pegawai yang melaksanakan piket, melakukan rekapitulasi absensi harian, melakukan rekapitulasi absensi bulanan, dan melakukan *input* data absensi pegawai yang melakukan piket.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Praktik Kerja

Tujuan dari praktik kerja yang dilaksanakan penulis di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara rinci manfaat dan tujuan dari penyusunan dan penerapan metode absensi kerja pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui tata cara sistem Absensi di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk memahami dan mengetahui proses kerja di Bidang Sekretariat Kepegawaian pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Adapun kegunaan dari praktik kerja yang dilaksanakan oleh penulis di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Secara umum

Hasil praktik kerja ini bermanfaat bagi penulis sebagai bekal awal pengalaman kerja yang akan berguna di masa yang akan datang untuk mengenal dunia kerja, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan.

2. Secara khusus

a. Bagi penulis

Kegiatan praktik kerja ini dapat mengenal dan merasakan bagaimana proses dan prosedur di dalam dunia kerja, menambah pengalaman, pengetahuan, serta wawasan yang didapatkan ketika penulis melakukan praktik kerja khususnya dalam bidang sumberdaya manusia.

b. Bagi perusahaan

Praktik kerja ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran di dalam menentukan kebijaksanaan yang akan ditetapkan oleh perusahaan dalam bidang sumberdaya manusia.

c. Bagi pembaca

Penulis mengharapkan agar laporan praktik kerja ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna tentang sumberdaya manusia bagi pembaca, ataupun menjadi referensi dan pembandingan.

1.4. Profil Tempat Praktik Kerja

Berikut adalah gambaran secara menyeluruh mengenai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, tempat penulis melakukan praktik kerja.

1.4.1. Sejarah Perusahaan

Perkebunan menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Beberapa pemahaman dasar tentang ruang lingkup perkebunan menurut Undang-undang perkebunan tersebut antar lain:

1. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
2. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
3. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
4. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
6. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
7. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

Bagi masyarakat Jawa Barat, pemahaman Perkebunan dan ruang lingkungannya kiranya telah lama dikuasai dan telah menjadi bagian persoalan kehidupan keseharian, dimana proses panjang sejarah keberadaan aktivitas perkebunan di wilayah Jawa Barat nampaknya sudah setara dengan perkembangan sejarah kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat itu sendiri sejak jaman kolonial sampai saat ini.

Oleh karena itu, jika berbicara tentang kebijakan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat tentu saja tidak bisa terlepas dari pemikiran tentang bagaimana mengoptimalkan keberadaan potensi sumberdaya perkebunan Jawa Barat yang cukup melimpah bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa barat secara keseluruhan.

Fungsi dan peran sub sektor perkebunan bagi pembangunan Provinsi Jawa Barat kiranya sudah cukup banyak terbukti, dimana dari aspek ekonomi bahwa sub sektor perkebunan telah menunjukkan kontribusi terhadap PDRB dan devisa negara yang cukup signifikan, sedangkan dari aspek lingkungan bahwa keberadaan lahan perkebunan telah berfungsi sebagai kawasan hidro-orologi yang cukup berpengaruh terhadap kondisi kelestarian lingkungan, serta dari aspek sosial bahwa sub sektor perkebunan telah berperan cukup efektif sebagai andalan pendapatan masyarakat, penyedia lapangan kerja di pedesaan dan mencegah urbanisasi.

Dengan demikian sangatlah beralasan apabila sub sektor perkebunan ini perlu terus didorong sebagai andalan pembangunan ekonomi Jawa Barat dalam jangka panjang.

Sub Sektor perkebunan tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan Jawa Barat sejak masa kolonial sampai sekarang, karena sektor ini memiliki arti yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Barat, bahkan dalam konteks masa lalu sejarah keberadaan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan di Jawa Barat pada khususnya, dipandang sebagai sejarah perkebunan itu sendiri.

Sejarah perkebunan di Jawa Barat sama halnya dengan sejarah perkebunan di Indonesia, diawali pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 dengan berdatangnya bangsa kolonial, untuk berdagang rempah-rempah yang bernilai tinggi saat itu. Beberapa komoditi seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis yang sebelumnya hanya dikumpulkan dari tanaman liar mulai dibudidayakan penduduk setempat, dimana kemudian nilai kemewahan rempah-rempah tersebut menjadi incaran bangsa kolonial untuk memonopoli perdagangan.

Pada abad ke-18 kaum kolonial mulai mengalihkan fokus perdagangan kepada tanaman perkebunan lainnya seperti kopi, tembakau dan tebu. Perkembangan usaha perkebunan mencapai puncaknya ketika VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang hampir bangkrut menerapkan kebijakan penanaman dan penyerahan wajib kopi di Priangan, yang dikenal sebagai *Preanger Stelsel* menjelang berakhirnya abad ke-18. Penanaman kopi di

Priangan ini kemudian menjadi model dari tumbuhnya usaha perkebunan yang diselenggarakan oleh negara pada abad berikutnya, yang dikenal sebagai Kultur stelsel atau Sistem Tanam Paksa.

Memasuki abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan posisi VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) berusaha memaksimalkan potensi lahan-lahan yang subur, lahan-lahan yang belum diolah, dan tenaga kerja penduduk lokal untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi ekspor, terutama kopi, tembakau, nila, dan gula.

Pada saat bersamaan ketika berlaku Sistem Tanam Paksa di tanah-tanah Gubernemen Jawa, sebuah perkembangan perkebunan baru yang melibatkan para pemodal swasta Barat. Perkebunan-perkebunan besar milik swasta di Jawa Barat telah berkembang sejak Daendels dan Raffles menjual tanah-tanah di Bogor, Karawang, dan Priangan, terutama kepada pengusaha-pengusaha swasta Barat dan Cina.

Penguasaan Belanda atas komoditas perkebunan, khususnya yang di kelola oleh korporasi, berakhir ketika terjadi pengambil alihan seluruh korporasi Belanda oleh pemerintah Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi jembatan emas untuk mengurai kabut penjajahan, yang secara ekonomis lebih berupa penguasaan perkebunan.

Untuk memastikan manfaat bagi bangsa Indonesia, nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan perkebunan besar dari negara asing kepada pemerintah Indonesia dilakukan berkali-kali. Pertama, sebagai konsekuensi dari kemenangan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Kedua, sebagai perwujudan deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada tanggal 10 Desember 1957. Ketiga, dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Perkebunan-perkebunan besar milik Belanda dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia.

Seiring dengan kemampuan pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perkebunan besar milik Belanda, perkebunan rakyat yang dikelola para pekebun atau petani kecil terus melakukan ekspansi, relatif tanpa bantuan pemerintah. Bahkan dapat dikatakan tak terjadi kerjasama antara perkebunan besar

dan perkebunan rakyat. Masing-masing berjalan sendiri sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing. Nasionalisasi perkebunan segera diikuti oleh konsolidasi manajemen perkebunan negara dan pengembangan perkebunan rakyat yang diatur pada satu kesatuan struktur dalam pemerintahan.

Lahirnya pemerintahan orde baru disertai dengan dilansirnya program pembangunan yang dikenal dengan sebutan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), membuat perkebunan kembali dilirik sebagai salah satu sektor paling berpotensi untuk menghasilkan devisa negara. Langkah pertama dimulai dengan tambahan modal dan peningkatan kemampuan Perkebunan Besar Negara (PN). Setelah itu, dimulailah langkah yang juga merupakan tonggak baru pengelolaan perusahaan perkebunan di Indonesia yaitu menggabungkan kekuatan Perkebunan Besar Negara dengan Perkebunan Rakyat. Penerapan pola pikir baru ini dilakukan pada pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sejak awal 1980-an. Sejak saat itu pola PIR sangat mewarnai pembangunan perkebunan di Indonesia. Langkah selanjutnya di akhir dekade 1980-an ialah menggunakan kesuksesan ini sebagai pemantik modal swasta untuk mendirikan Perkebunan Besar Swasta (PBS) baik dengan pembangunan yang memanfaatkan Hak Guna Usaha (HGU).

Dan kini terbukalah cakrawala baru perkebunan Indonesia. Akumulasi sejarah telah menunjukkan kekuatan modal, manajemen, penelitian dan penemuan benih unggul, pendidikan khusus, hingga pemasaran, untuk menegakkan perkebunan lebih kokoh. Kini pengokoh tersebut dilengkapi dengan demokratisasi di dalam dan sekitar perkebunan.

Demokratisasi ini melahirkan serangkaian konsekuensi pengaturan sekaligus manfaat tersendiri. Demokratisasi membutuhkan jaringan hubungan yang simetris dan setara di antara semua pihak yang terkait dengan perkebunan: Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan Rakyat (PR), pemerintah, konsumen di dalam dan luar negeri, lembaga pendukung penelitian dan pengembangan, lembaga pendanaan, input produksi, pemasaran. Tidak mengherankan pengembangan perkebunan masa kini ditegaskan di atas pengembangan jaringan hubungan antar pihak.

Jaman terus berubah, perkembangan kebijakan dan fokus pemahaman masyarakat tentang arah pembangunan perkebunan mengalami penyesuaian-penyesuaian. Sehingga pada kondisi jangka panjang peran penting perkebunan akan semakin meningkat di masa depan. Krisis energi dunia telah menempatkan posisi perkebunan pada tingkat yang sangat penting. Perkebunan tak lagi hanya terkait masalah pangan, tetapi kini perkebunan berada di persimpangan kepentingan antara *food, feed* dan *fuel*.

Sejak awal kemerdekaan sudah terpampang kuat hasrat untuk menyejahterakan rakyat pekebun, pekerja perkebunan, maupun yang memperoleh manfaat tidak langsung dari usaha perkebunan. Di atas itu semua perkebunan masih tetap dan akan terus menjadi sumber kemakmuran bangsa ini.

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana OPD ini sejak awal pembentukannya telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pada tahun 1950 didirikan Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor di bawah Kementrian Pertanian.
2. Pada awal tahun 1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang menjadi Kantor Karet Cabang Jawa Barat.
3. Pada awal tahun 1956 ditingkatkan menjadi Jawatan Karet Rakyat Provinsi Jawa Barat.
4. Berdasarkan PP 64 Tahun 1957 terjadi penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 28 mei 1958, dan nama Karet Rakyat Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan karet Rakyat daerah (Swatantra) Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor.
5. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Tanaman Karet Departemen Pertanian tanggal 31 oktober 1963, Nomor: 44/DTK/AA/63, pada tanggal 8 november 1963 dibentuk Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat.
6. Sejak tanggal 30 Nopember 1964 sesuai SK Gubernur No. 2395/V.10/Peg/64. Jawatan Karet Rakyat DT. I Jawa Barat dan Perwakilan Dana Tanaman Keras

Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung. Pengintegrasian ini selanjutnya ditambah lagi dengan terbentuknya badan-badan dari KOTOE yang disebut Badan Urusan karet (BUKARET) yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Mei 1964 No.42/B.I?Ekos/1964, kemudian pada awal tahun 1965 disusun dengan Pembentukan Badan Urusan Kopra (BUKOPRA).

7. Dengan meningkatkan tugas-tugas serta volume pekerjaan yang semakin meluas maka Gubernur Jawa Barat pada tanggal 31 November 1965 menerbitkan Sk. No.B.III/4328/V.46/Peg/SK/65 yang berisikan formasi baru Jawatan Karet Rakyat Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 5 wilayah dan 15 cabang-cabang di kabupaten yaitu: kabupaten Serang, pandeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Purwakarta.
8. Sebagai akibat dibentuknya KOTOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya badan-badan BUKOPRA aktifitasnya terhenti. Disamping itu dengan pengalihannya Dana Tanaman Keras dari Departemen Pertanian ke Departemen Perkebunan dan sebagai akibat Care Takership maka dalam periode 1965-1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman keras mengalami kegoncangan dimana hubungan teknis organisatoris dengan pusat menjadi terhenti sehingga mengakibatkan pula tugas pekerjaan dan anggaran pusat terhenti.
9. Sebagai akibat dibentuknya KOTOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya badan-badan BUKOPRA aktifitasnya terhenti. Disamping itu dengan pengalihannya Dana Tanaman Keras dari Departemen Pertanian ke Departemen Perkebunan dan sebagai akibat Care Takership maka dalam periode 1965-1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman keras mengalami kegoncangan dimana hubungan teknis organisatoris dengan pusat menjadi terhenti sehingga mengakibatkan pula tugas pekerjaan dan anggaran pusat terhenti.
10. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tanggal 18 Juni 1966 No. 49/Reg/24.D/AF/66 ditunjuk Jawatan karet Rakyat sebagai

satu-satunya Instansi Pemerintah Daerah Jawa Barat yang menangani dibidang Perkaretan dan Tanaman Keras lainnya. Sebelum diterbitkan SK. Gubernur Jawa Barat tersebut di atas pengelolaan urusan Tanaman Keras lainnya selain Tanaman Karet semula merupakan sebagian tugas dan Jawatan Pertanian Rakyat Provinsi Jawa Barat bagian Tanaman Industri. Sehingga setelah diterbitkannya SK Gubernur Jawa Barat No.49/Reg/24.D/Df/66 Pengelolaan Tanaman Keras oleh Bagian Tanaman Industri jawatan Pertanian Rakyat tersebut dilimpahkan menjadi Tugas Jawatan Karet Rakyat yang selain bergerak dibidang Perkaretan juga menangani pengelolaan tanaman keras lainnya.

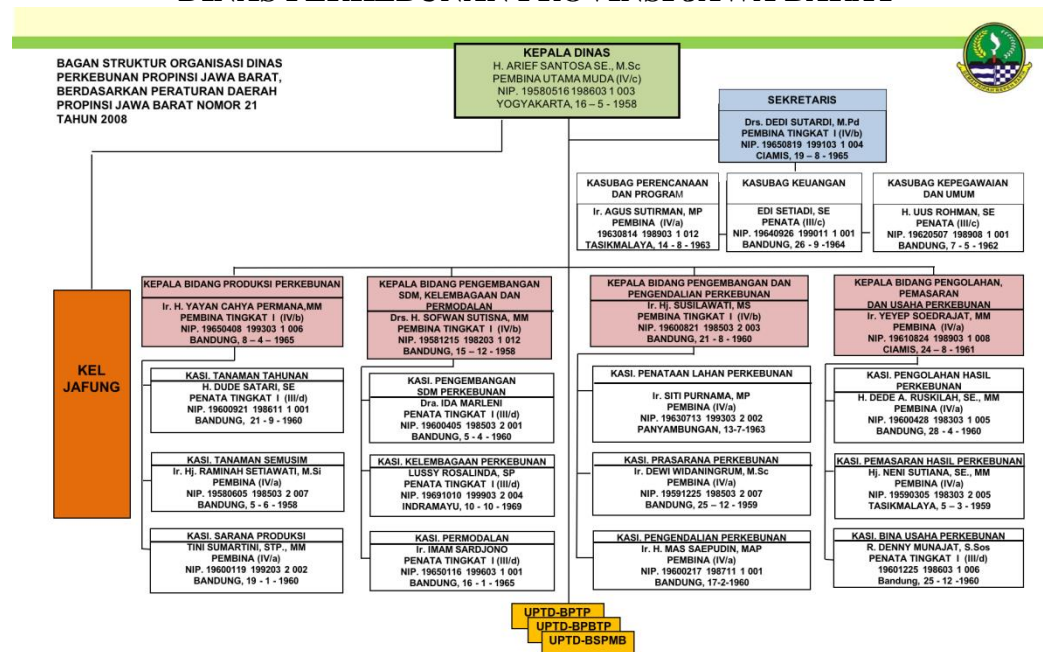
11. Selanjutnya dalam tahun 1968 dengan dilikuidasi Dana Tanaman Keras dan *Regrouping* Departemen Pertanian, maka melalui Surat keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 12 juni 1968 No. 147/B/III/T/sk/68, mengganti nama Jawatan Karet Rakyat DT.I Jawa Barat menjadi Jawatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jawa Barat.
12. Pada tahun 1974 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang didalamnya diuraikan perubahan nama Jawatan menjadi Dinas. Sehingga status Jawatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jawa Barat diubah nama menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
13. Dengan terbitnya PP No.22 tahun 1975 maka inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI dan Dinas Perkebunan Rakyat Jawa Barat sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.179 tahun 1976 dan No.429/Kpts/Org/1976 tentang ketentuan pelaksanaan PP 22/1975, menjadi
14. Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Peraturan Daerah No. 13/DP 04/PD/1978 membentuk Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang mempunyai cabang Dinas di Tingkat Kabupaten.
15. Pada tahun 1983 Pemerintah Provinsi DT I Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah (perda) No 15 tahun 1981 dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi DT I Jawa Barat.

16. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka status organisasi berubah menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

1.4.2. Struktur Organisasi Perusahaan Dan Uraian Pekerjaan

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat secara umum dapat dilihat di gambar 1.1.

GAMBAR 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2016.

Uraian singkat pekerjaan pada setiap posisi di Dinas Perkebunan, tempat penulis melakukan praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas dan uptd.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Sekretariat membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan dan Program.

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan program kerja, pengelolaan data dan informasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Subbagian Keuangan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

3. Bidang Produksi Perkebunan

Bidang produksi perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman semusim dan sarana produksi.

Bidang Produksi Perkebunan membawahkan:

a. Seksi Tanaman Tahunan

Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi budidaya tanaman tahunan.

b. Seksi Tanaman Semusim.

Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi budidaya tanaman semusim.

c. Seksi Sarana Produksi.

Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana produksi.

4. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kelembagaan dan Permodalan.

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kelembagaan dan Permodalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sumberdaya manusia, kelembagaan dan permodalan.

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kelembagaan dan Permodalan Membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perkebunan.

Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sumberdaya manusia perkebunan.

b. Seksi Kelembagaan Perkebunan.

Seksi Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi kelembagaan perkebunan.

c. Seksi Permodalan.

Seksi Permodalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi permodalan.

5. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi, penataan lahan perkebunan, prasarana perkebunan serta pengendalian perkebunan.

Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Perkebunan membawahkan:

a. Seksi Penataan Lahan Perkebunan.

Seksi Penataan Lahan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan lahan perkebunan.

b. Seksi Prasarana Perkebunan.

Seksi Prasarana Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi prasarana perkebunan.

c. Seksi Pengendalian Perkebunan.

Seksi Pengendalian Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian perkebunan.

6. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengolahan, pemasaran dan usaha tani perkebunan.

Bidang Pengolahan, Pemasaran Dan Usaha Perkebunan Membawahkan:

a. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan.

Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengolahan hasil perkebunan.

b. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan.

Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemasaran hasil perkebunan.

c. Seksi Bina Usaha Perkebunan.

Seksi Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bina usaha perkebunan.

1.4.3. Kondisi Permodalan Dan Keuangan

Untuk kondisi permodalan atau keuangan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pihak Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tidak dapat mempublikasikan data karena kondisi permodalan atau keuangannya merupakan tidak transparan. Akan tetapi, sumber keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1.4.4. Kegiatan Usaha

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang perkebunan, berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan perkebunan sumberdaya manusia kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan sumberdaya manusia kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan sumberdaya manusia kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.

1.4.5. Gambaran Umum Ketenagakerjaan

Gambaran umum ketenagakerjaan Bagian Kepegawaian di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini:

TABEL 1.1.
JUMLAH PEGAWAI
BAGIAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Golongan	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai
1	II/a	SMP	1 orang
2	II/b	SMA	4 orang
3	II/c	SMA	4 orang
4	III/b	S1	1 orang
5	III/c	S1	1 orang
TOTAL			11 orang

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2016

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gaji yang didapat oleh para pegawai yang bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2.
GAJI POKOK PEGAWAI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Golongan	Gaji	Kompensasi
I/a	Rp. 1.486.500	1. Gaji Pokok. 2. Tunjangan Istri (10% dari gaji pokok). 3. Tunjangan Anak (2% dari gaji pokok, maksimal 2 anak). 4. Tunjangan Umum/Tunjangan Jabatan Fungsional/Tunjangan Jabatan Struktural. 5. Tunjangan Beras. 6. Pembulatan. 7. Tunjangan PPh.
I/b	Rp. 1.623.400	
I/c	Rp. 1.692.100	
I/d	Rp. 1.730.600	
II/a	Rp. 2.017.900	
II/b	Rp. 2.103.300	
II/c	Rp. 2.193.200	
II/d	Rp. 2.285.000	
III/a	Rp. 2.696.200	
III/b	Rp. 2.810.300	
III/c	Rp. 2.929.100	
III/d	Rp. 3.053.000	
IV/a	Rp. 3.182.100	
IV/b	Rp. 3.316.700	
IV/c	Rp. 3.457.000	
IV/d	Rp. 3.603.300	
IV/e	Rp. 3.755.700	

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2016.

Berdasarkan Masa Kerja Golongan (MKG) Besarnya gaji yang diperoleh oleh setiap pegawai sesuai dengan golongannya setiap tahunnya akan meningkat sebagaimana telah di tentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.